

Judul : Pertumbuhan Ekonomi: Asumsi Pemerintah Dipertanyakan
Tanggal : Jumat, 15 Juli 2016
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

PERTUMBUHAN EKONOMI

Asumsi Pemerintah Dipertanyakan

JAKARTA (Suara Karya): Kalangan DPR mempertanyakan besarnya rentang asumsi pertumbuhan ekonomi RAPBN 2017 yang diajukan oleh pemerintah sebesar 5,3-5,9 persen. "Rentang yang terlalu besar itu 'meaningless' (tidak ada artinya). Pasar akan menilai pemerintah seperti menggantungkan suatu pekerjaan besar pada nasib baik," ujar Anggota DPR Komisi XI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno saat rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Kamis.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro di RAPBN 2017, pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen. BI memasangkan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2017 akan berada pada rentang 5,2—5,6 persen, lebih rendah

dari asumsi pemerintah sebesar 5,3—5,9 persen. "Prospek ekonomi nasional 2017 masih akan ditopang karena perbaikan permintaan domestik. Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global, ekspor juga membaik," ujar dia.

Gubernur BI Agus Martowardojo membeberkan, kontribusi ekspor, yang selama ini anjlok, akan membaik pada tahun depan. Namun perbaikannya belum terlalu signifikan. Sedangkan, konsumsi rumah tangga, sebagai penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, juga akan pulih seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat. Perbaikan ekonomi domestik juga dipengaruhi dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Agus, prospek pertumbuhan ekonomi du-

nia pada 2017 akan mencapai 3,3 persen, atau lebih besar dari perkiraan tahun ini sebesar 3,1 persen.

Menurut Hendrawan, pemerintah sebaiknya lebih mempersempit rentang asumsi pertumbuhan ekonomi agar tidak terkesan mengharapkan adanya semacam 'keajaiban' yang dapat membuat ekonomi Indonesia membaik pada tahun depan.

Untuk 2016 ini saja, target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam APBNP 2016 yakni sebesar 5,2 persen. Pada 2017 mendatang, Hendrawan memperkirakan dinamika pertumbuhan ekonomi global akan relatif sama dengan tahun ini, sehingga pemerintah diharapkan juga lebih realistis dalam menentukan asumsi makro. (nun)